

## PENERAPAN PRINSIP *CITIZENSHIP* (PERAN AKTIF MASYARAKAT) DALAM MITIGASI BENCANA ERUPSI GUNUNG MARAPI DI WILAYAH AGAM TIMUR

Haikal Pratama<sup>1(a)</sup>, Zikri Alhadi<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

<sup>a</sup>haikalpratama0102@gmail.com, <sup>b</sup>zikrialhadi@fis.unp.co.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

25-05-2025

Diterbitkan Online:

30-09-2025

#### Kata Kunci:

Mitigasi Bencana, Erupsi  
Gunung Marapi, Citizenship

#### Keywords:

Disaster Mitigation, Mount  
Marapi Eruption, Citizenship

#### Corresponding Author:

haikalpratama0102@gmail.com

### ABSTRAK

Penerapan prinsip *citizenship* dalam penanggulangan bencana menekankan keterlibatan aktif warga negara dalam menjaga keselamatan dan ketahanan wilayah melalui partisipasi dan kolaborasi dengan pemerintah. Dalam menghadapi bencana, peran *citizenship* menjadi penting untuk mendukung efektivitas mitigasi. *Citizenship* tidak hanya merujuk pada status hukum warga negara, tetapi juga hak dan kewajiban dalam kehidupan publik seperti hak memilih, perlindungan hukum, dan akses layanan dasar (Lubis et al., 2023). Marshall (1950) menjabarkan *citizenship* dalam tiga elemen: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Dalam konteks mitigasi, ketiganya saling menguatkan—akses informasi, partisipasi kebijakan, dan bantuan sosial yang merata adalah kunci membangun ketangguhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip *citizenship* dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Marapi di wilayah Agam, dengan fokus pada peran serta masyarakat dan responsivitas pemerintah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat BPBD, wali nagari, tokoh masyarakat, dan warga terdampak, serta dokumentasi kebijakan dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi aktif dalam kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana, meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan lemahnya koordinasi antar lembaga. BPBD berperan penting dalam penyebaran informasi dan pelaksanaan kebijakan mitigasi adaptif. Kesimpulannya, penerapan prinsip *citizenship* dalam mitigasi bencana di Agam telah berjalan namun perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan jejaring antar lembaga, dan pengarusutamaan nilai kewargaan dalam kebijakan kebencanaan.

### ABSTRACT

The application of the *citizenship* principle in disaster management emphasizes the active involvement of citizens in ensuring the safety and resilience of their regions through both direct participation and collaboration with the government. This study analyzes the implementation of *citizenship* in the mitigation of the Mount Marapi eruption in Agam, focusing on community participation and the responsiveness of the Regional Disaster Management Agency (BPBD). Using a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews with BPBD officials, village leaders, community figures, and affected residents, supported by policy documents and official reports. Findings indicate that communities actively participate in preparedness and response efforts, though challenges remain in terms of limited resources and weak inter-agency coordination. BPBD plays a key role in information dissemination and adaptive policy implementation. The study concludes that while *citizenship*-based mitigation is in progress, it requires further strengthening

*through capacity building, institutional coordination, and the integration of civic values in disaster policies.*

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1251>

**PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana alam yang tinggi karena terletak di pertemuan empat lempeng tektonik utama: Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina. Sebagian besar wilayahnya, seperti Jawa dan Sumatera, berada di Cincin Api Pasifik yang rawan gempa, tsunami, dan letusan gunung api (Doni Monardo, 2019). Dengan 129 gunung api aktif—sekitar 13% dari total gunung api dunia—Indonesia memiliki potensi bahaya tinggi, termasuk dari Gunung Marapi di Sumatera Barat yang telah aktif sejak 1807 (Fatima & Sudibyo, 2023). Erupsi besar terakhir terjadi pada 3 Desember 2023 dengan kolom abu setinggi 3.000 meter. Kedekatan Marapi dengan permukiman membuatnya berisiko tinggi akibat potensi lontaran material, awan panas, dan banjir lahar (Purba et al., 2022).

Erupsi Marapi pada 3 Desember 2023 pukul 14:54 WIB merupakan kelanjutan dari aktivitas vulkanik yang telah meningkat sejak awal tahun. Aktivitas tersebut mencakup letusan eksplosif dan gempa vulkanik, dengan status Level II (WASPADA) yang telah berlaku sejak 3 Agustus 2011. Merespons risiko ini, mitigasi bencana menjadi krusial. Mitigasi mencakup kesiapsiagaan, penyiapan fisik, dan kemampuan mobilisasi (Mendagri, 2023), sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 dan Perka BNPB No. 4 Tahun 2008, yang membagi mitigasi ke dalam aspek struktural dan non-struktural. Pemerintah telah membentuk BPBD dan Kelompok Siaga Bencana (KSB), namun efektivitasnya masih terganjal minimnya partisipasi masyarakat (Nugroho et al., 2023).

Peran *citizenship* krusial dalam mitigasi bencana, mencakup hak sipil, politik, dan sosial yang saling mendukung. Ketiganya—akses informasi, partisipasi kebijakan, dan distribusi bantuan sosial—membangun ketangguhan masyarakat (Lubis et al., 2023; Marshall, 1950). Dalam menghadapi bencana, peran *citizenship* menjadi penting untuk mendukung efektivitas mitigasi. *Citizenship* tidak hanya merujuk pada status hukum warga negara, tetapi juga hak dan kewajiban dalam kehidupan publik seperti hak memilih, perlindungan hukum, dan akses

layanan dasar (Lubis et al., 2023). Marshall (1950) menjabarkan *citizenship* dalam tiga elemen: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Dalam konteks mitigasi, ketiganya saling menguatkan—akses informasi, partisipasi kebijakan, dan bantuan sosial yang merata adalah kunci membangun ketangguhan masyarakat.

Amartya Sen (dalam Emilia, 2023) memperluas pemahaman *citizenship* dengan menekankan kebebasan substantif, yakni kemampuan riil individu untuk terlibat dalam kehidupan publik dan menentukan masa depannya. Ketahanan masyarakat terhadap bencana menurut Sen tidak cukup dengan intervensi negara, tetapi juga bergantung pada kemampuan warga mengakses informasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan. Di sisi lain, David Held (1995) memperkenalkan konsep global *citizenship*, yang menekankan solidaritas lintas negara dalam menghadapi tantangan global, termasuk bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi bencana juga merupakan isu moral global yang menuntut partisipasi aktif warga dunia.

Observasi dan wawancara di Nagari Sungai Pua menunjukkan bahwa meskipun program KSB telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Agam, efektivitasnya belum optimal. Keterlibatan masyarakat, termasuk pemuda Karang Taruna, masih rendah. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan warga, serta lemahnya perspektif *citizenship* dalam masyarakat. Ketika hak politik dan sosial belum terpenuhi, partisipasi cenderung pasif dan program bersifat top-down. Masyarakat tidak hanya membutuhkan sosialisasi, tetapi juga pelibatan dalam perencanaan, simulasi, hingga evaluasi kebijakan mitigasi.

Indikator *citizenship* dalam mitigasi mencakup kesadaran risiko, pemahaman kebijakan, partisipasi perencanaan, dan keterlibatan dalam pelatihan. Solidaritas sosial dan kerja sama warga juga penting untuk mempercepat pemulihan. *Citizenship* aktif menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar penerima kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif perlu

diperkuat dengan melibatkan masyarakat sejak tahap awal hingga akhir, melalui pelatihan berbasis kearifan lokal, peta rawan partisipatif, dan sistem peringatan dini. Program mitigasi yang sukses mensyaratkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat (Sembada et al., 2024).

Berdasarkan permasalahan di atas, melalui penelitian ini diharapkan dapat digali informasi yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas mitigasi bencana erupsi Gunung Marapi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Marapi di wilayah Agam Timur dalam Perspektif *Citizenship*”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas mitigasi bencana erupsi Gunung Marapi di Agam Timur, dengan fokus pada partisipasi masyarakat dan responsivitas BPBD. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan ini bertujuan mendeskripsikan fenomena secara sistematis dan mendalam. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih secara purposive, yaitu pejabat BPBD, wali nagari, tokoh masyarakat, dan warga terdampak. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi kebijakan dan laporan resmi. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, dokumentasi, dan observasi non-partisipan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, yaitu memilah informasi relevan berdasarkan tema utama seperti partisipasi masyarakat dan responsivitas BPBD, serta menghilangkan data yang tidak relevan atau redundan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, menggunakan tabel, diagram, atau matriks untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel. Penyajian data juga mencakup pengelompokan hasil wawancara berdasarkan kategori informan, seperti pejabat BPBD, tokoh masyarakat, dan warga terdampak. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis pola atau hubungan dari data yang telah disajikan, membandingkan temuan dengan teori mitigasi dan prinsip *citizenship*, serta melakukan interpretasi berdasarkan triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi informasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan

dokumentasi, serta mengkonfirmasi kesesuaian informasi dari berbagai pihak. Penelitian ini dilaksanakan pada Mei 2025 di wilayah rawan erupsi Gunung Marapi, dengan tujuan memberikan gambaran objektif dan komprehensif mengenai efektivitas kebijakan mitigasi berdasarkan prinsip *citizenship*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Mitigasi Bencana oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mitigasi bencana karena berada di garis depan dalam melindungi masyarakat. Strategi yang diterapkan meliputi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), pembangunan infrastruktur tahan bencana, pemetaan wilayah rawan bencana, serta pelaksanaan simulasi dan edukasi secara berkala. Mitigasi bencana ini juga sudah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang sebagai langkah preventif untuk meminimalkan korban jiwa dan kerugian infrastruktur. Sinergi antar lembaga seperti BPBD, TNI/Polri, dan lembaga swadaya masyarakat turut memperkuat kapasitas tanggap darurat secara menyeluruh.

Selain aspek teknis, mitigasi bencana kini menjadi bagian integral dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut integrasi pembangunan fisik dengan penguatan kapasitas sosial masyarakat. Oleh sebab itu, strategi jangka panjang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat di setiap tahapan penanggulangan bencana.

Di Kabupaten Agam, khususnya dalam menghadapi erupsi Gunung Marapi di wilayah Agam Timur, mitigasi dilakukan secara berjenjang dan terkoordinasi. Kepala Pelaksana BPBD Agam, Bapak Budi Perwira Negara, menyatakan bahwa koordinasi intensif dengan Pos Pengamatan Gunung Marapi di Bukittinggi merupakan langkah awal yang sangat penting. Pos tersebut menjadi sumber utama data dan informasi terkini mengenai aktivitas vulkanik sebagai dasar pengambilan keputusan mitigasi.

Budi menjelaskan bahwa mitigasi dilakukan berdasarkan empat tingkatan status aktivitas gunung, yakni normal, waspada, siaga, dan awas. Pada status waspada, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak gunung. Ketika status naik menjadi siaga, area evakuasi diperluas hingga 7 km dan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia mulai

direlokasi. Jika status mencapai awas, yang menandakan letusan telah terjadi, maka evakuasi menyeluruh dilakukan sesuai protokol yang sudah disiapkan. Budi menambahkan, “Ketika status siaga, aktivitas vulkanik meningkat signifikan sehingga masyarakat dalam radius 7–10 km diimbau untuk siaga, dan kelompok rentan sudah mulai dievakuasi.”

Sosialisasi juga menjadi elemen kunci dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. BPBD Agam secara rutin mengadakan penyuluhan ke masyarakat dan sekolah-sekolah di lima kecamatan terdampak, yaitu Canduang, Sungai Pua, Baso, Ampek Angkek, dan Malalak. Selain itu, pemasangan rambu dan penetapan jalur evakuasi telah dilakukan sebagai upaya memudahkan masyarakat dalam mengevakuasi diri saat situasi darurat. Kelompok Siaga Bencana (KSB) di tingkat nagari berperan sebagai garda terdepan mitigasi di komunitas masing-masing. Budi menegaskan bahwa peran aktif KSB sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan memastikan pelaksanaan evakuasi berjalan lancar.

Tidak hanya dari eksekutif, DPRD Kabupaten Agam juga menunjukkan komitmen besar dalam mendukung mitigasi bencana melalui perumusan regulasi, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Anggota DPRD Kabupaten Agam, Bapak Feri Adrianto, menegaskan bahwa peran legislatif sangat krusial untuk memberikan payung hukum yang jelas agar semua kebijakan mitigasi bisa dilaksanakan secara efektif. Ia mengungkapkan bahwa kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah memastikan mitigasi bencana memiliki dasar legal yang kuat dan berkelanjutan.

Pendekatan berbasis komunitas juga diimplementasikan melalui peran aktif pemerintah nagari. Di Nagari Sungai Pua, misalnya, dibentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang terdiri dari perwakilan tiap jorong dan tokoh masyarakat. Pemerintah Nagari juga melibatkan tokoh adat, kepala kampung, serta seluruh unsur masyarakat dalam tim penanggulangan bencana. Pendekatan ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat di tingkat lokal menjadi fondasi utama dalam pengurangan risiko bencana. Menurut narasumber dari pemerintah nagari, wilayah yang cukup luas dan jorong-jorong berjauhan memerlukan partisipasi aktif masyarakat agar sistem mitigasi berjalan efektif.

Namun demikian, membangun budaya siaga bencana masih menjadi tantangan besar. Kepala

Pelaksana BPBD Agam menyatakan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat bukanlah proses yang instan. Kesadaran tersebut harus dibangun secara berulang dan konsisten agar bisa menumbuhkan keyakinan dan kesiapsiagaan yang mumpuni. Pengalaman erupsi Gunung Marapi pada 3 Desember 2023 menjadi pelajaran penting untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan dan meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat. Budi menambahkan bahwa bencana tersebut menjadi momentum yang memperkuat komitmen semua pihak untuk terus mengembangkan mitigasi yang lebih baik.

Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas keterlibatan fisik dalam kegiatan, tetapi juga pengakuan terhadap pengetahuan lokal yang selama ini kerap terabaikan. BPBD Agam menekankan pentingnya kolaborasi antara pengetahuan ilmiah dan lokal dalam membaca tanda-tanda alam. Masyarakat setempat selalu aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan mitigasi, mulai dari sosialisasi, simulasi evakuasi, hingga dukungan logistik saat bencana terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan mitigasi yang bersifat inklusif mampu meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap keselamatan bersama.

Selain itu, kapasitas petugas dan relawan juga terus ditingkatkan melalui pelatihan teknis dan manajemen bencana secara rutin. Budi menyebutkan bahwa pelatihan tersebut dilakukan secara berkala agar seluruh anggota BPBD dan relawan siap menghadapi berbagai situasi darurat secara profesional dan terorganisir.

Secara keseluruhan, strategi mitigasi bencana yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Agam menunjukkan pendekatan yang terencana, kolaboratif, dan berbasis partisipasi masyarakat. Keterlibatan lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, DPRD, pemerintahan nagari, hingga masyarakat—menjadi fondasi kuat dalam menciptakan sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan adaptif. Strategi ini membuktikan bahwa mitigasi bencana tidak hanya soal teknologi dan kebijakan, tetapi juga menyangkut komitmen, kepercayaan sosial, dan kesadaran kolektif yang harus terus dibangun bersama demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain upaya perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, strategi mitigasi yang diterapkan oleh pemerintah

daerah juga mencakup peningkatan kapasitas petugas tanggap darurat dan penguatan sistem informasi kebencanaan (BPPB, 2020). BPBD Agam, misalnya, telah melakukan pelatihan intensif untuk petugas lapangan yang bertugas selama bencana. Hal ini bertujuan agar petugas dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi darurat, serta mampu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat yang terdampak. Pelatihan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan penanganan yang dapat memperburuk situasi bencana, seperti yang disampaikan oleh Syarifah et al. (2020) dalam penelitiannya mengenai peningkatan kemampuan petugas mitigasi bencana.

Namun, meskipun berbagai langkah mitigasi telah diterapkan, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah adalah terbatasnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur tahan bencana. Keberadaan anggaran yang terbatas sering kali menghambat pengadaan peralatan canggih untuk pemantauan bencana, seperti sensor gempa atau alat pendeteksi lahar. Menurut Tamitiadini et al. (2019), pembiayaan yang lebih baik dan pendistribusian anggaran yang lebih efisien akan sangat membantu dalam memperkuat kapasitas mitigasi bencana daerah, terutama untuk daerah-daerah yang rawan bencana seperti Kabupaten Agam.

### **Penerapan Prinsip *Citizenship* dalam Mitigasi Bencana**

Penerapan prinsip *citizenship* dalam mitigasi bencana menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam seluruh tahapan pengurangan risiko bencana. Prinsip ini tidak hanya berfokus pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kebencanaan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil inisiatif dalam membangun ketahanan lokal, yang pada gilirannya menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Solidaritas sosial juga diperkuat melalui keterlibatan tersebut.

Secara konseptual, prinsip *citizenship* dapat dipahami sebagai kesadaran dan tanggung jawab individu sebagai bagian dari komunitas dalam menjalankan hak dan kewajibannya terhadap negara dan masyarakat. Dalam konteks mitigasi bencana, hal ini berarti masyarakat tidak hanya pasif menunggu

bantuan, melainkan aktif mengambil peran dalam pencegahan, kesiapsiagaan, evakuasi, dan pemulihan pasca bencana.

Penelitian di Kabupaten Agam, terutama terkait potensi erupsi Gunung Merapi, menunjukkan bahwa penerapan prinsip *citizenship* cukup tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Agam, Bapak Budi, menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana dan tanggung jawab mereka sangat penting dalam mitigasi. Ia menegaskan, “Masyarakat harus tahu kapan harus melakukan evakuasi, ke mana harus pergi, dan apa yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi.” Untuk mendukung hal ini, pemerintah daerah telah membentuk sistem evakuasi yang melibatkan masyarakat, termasuk pemasangan rambu-rambu dan penetapan titik evakuasi di beberapa kecamatan terdampak.

Sementara itu, Dr. Hasrul, M.Si, seorang pakar kewarganegaraan, menambahkan bahwa prinsip *citizenship* dalam konteks mitigasi bencana tidak sebatas kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga mencakup peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan. Ia mengungkapkan, “Prinsip *citizenship* dalam mitigasi bencana berarti masyarakat tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga aktif mengambil peran dalam upaya pencegahan dan pemulihan.”

Keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana di Kabupaten Agam terlihat jelas melalui partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, hingga evakuasi mandiri dan penyediaan kebutuhan dasar bagi pengungsi. Keberadaan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di setiap nagari menjadi ujung tombak pelaksanaan mitigasi di tingkat komunitas. Budi mengungkapkan, “Keberadaan KSB sangat penting karena mereka berfungsi sebagai perpanjangan tangan BPBD dalam penanggulangan bencana.”

Pengalaman saat erupsi Gunung Merapi pada Desember 2023 membuktikan efektivitas prinsip *citizenship*. Masyarakat sekitar gunung mampu melakukan evakuasi mandiri dengan cepat dan tertib, menyelamatkan diri dan keluarga menuju lokasi aman sebelum bantuan resmi tiba. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman risiko dan kesiapsiagaan telah tertanam dengan baik di masyarakat.

Meski demikian, tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat masih ada. Budi mengakui bahwa proses meyakinkan

masyarakat tentang potensi bencana tidak bisa dilakukan sekali dua kali saja. Ia menuturkan, “Kami terus menerus memberikan pemahaman dan keyakinan tentang adanya potensi bencana. Setelah beberapa bencana, seperti letusan gunung dan banjir bandang, kesadaran masyarakat semakin meningkat. Mereka kini lebih memahami risiko dan bahaya di sekitarnya dibandingkan sebelumnya.”

Dr. Hasrul menambahkan bahwa tantangan lain terdapat pada pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan saluran komunikasi yang efektif agar pesan mitigasi dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh semua pihak. “Membangun mekanisme komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga menjadi sangat penting agar informasi dapat disampaikan dengan jelas dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ke depan, penguatan prinsip *citizenship* dianggap sangat krusial untuk menciptakan sistem mitigasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Budi berharap masyarakat semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan dan lebih aktif berpartisipasi dalam upaya mitigasi. “Ke depan, kita berharap masyarakat lebih memahami dan berperan aktif dalam mitigasi bencana,” katanya.

Pengalaman dari bencana sebelumnya menjadi modal penting untuk mendorong kesadaran kolektif yang lebih kuat. Dr. Hasrul juga menggarisbawahi bahwa pemahaman masyarakat sebagai bagian integral dari sistem mitigasi bencana harus terus ditingkatkan. “Penguatan kapasitas masyarakat dan peningkatan pemahaman tentang risiko bencana menjadi sangat penting agar mereka dapat menjadi aktor utama dalam mitigasi,” ujarnya.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *citizenship* dalam mitigasi bencana di Kabupaten Agam telah memperlihatkan hasil yang positif, khususnya dalam pengurangan dampak bencana dan percepatan pemulihan. Kolaborasi sinergis antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan, walaupun tantangan terkait kesadaran dan komunikasi masih perlu terus diatasi. Dengan fokus pada penguatan prinsip kewarganegaraan, mitigasi bencana diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan efektif demi keselamatan bersama.

Penerapan prinsip *citizenship* dalam mitigasi bencana tidak hanya terbatas pada partisipasi masyarakat dalam menyebarkan informasi,

tetapi juga dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan mitigasi (Indriani, 2021). Masyarakat di Nagari Sungai Pua, misalnya, ikut serta dalam forum musyawarah yang membahas perencanaan pembangunan infrastruktur tahan bencana. Melalui forum ini, masyarakat tidak hanya memberikan masukan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menentukan prioritas pembangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Ritonga (2024), yang menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam perencanaan kebijakan mitigasi bencana mampu meningkatkan efektivitas dan rasa tanggung jawab masyarakat.

Selain itu, keberhasilan penerapan prinsip *citizenship* juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah (Wulandari, 2022). Di Kabupaten Agam, meskipun ada keterbatasan dalam fasilitas dan teknologi, kepercayaan masyarakat terhadap tindakan pemerintah dalam mitigasi bencana cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga yang mengikuti program pelatihan dan simulasi yang diadakan oleh BPBD. Sebagai contoh, masyarakat yang berpartisipasi dalam pelatihan evakuasi massal di Nagari Sungai Pua merasa lebih siap menghadapi bencana. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini juga didukung oleh transparansi dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan oleh Aprilla et al. (2024) dalam risetnya tentang hubungan kepercayaan dalam mitigasi bencana.

### **Peran Aktif Masyarakat dalam Mitigasi Bencana**

Mitigasi bencana di Kabupaten Agam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi warga menjadi elemen penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengadopsi prinsip *bottom-up approach*, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menciptakan ketangguhan komunitasnya sendiri.

Dalam perspektif kewarganegaraan (*citizenship*), keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana berarti warga negara turut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan publik yang berkaitan dengan penanggulangan

bencana. Dr. Hasrul, M.Si, menegaskan bahwa segala aktivitas yang menyangkut kebutuhan publik harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang paling merasakan dampak langsung maupun tidak langsung dari bencana.

Di Kabupaten Agam, peran aktif masyarakat sudah terlihat nyata, terutama dalam menghadapi erupsi Gunung Merapi yang berulang kali mengguncang wilayah ini dan memberi dampak besar pada kehidupan masyarakat. Warga tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, melainkan turut berperan dalam berbagai kegiatan preventif dan responsif.

Salah satu contoh nyata adalah pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di setiap nagari. KSB berfungsi sebagai ujung tombak dalam penanggulangan bencana di tingkat lokal. Wali Nagari Sungai Pua menjelaskan bahwa pembentukan KSB melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti pemuda, tokoh adat, kepala kampung, dan aparaturnagari. Karena wilayah Nagari Sungai Pua cukup luas dengan jorong-jorong yang berjauhan, peran serta masyarakat sangat penting agar penanggulangan bencana berjalan efektif.

KSB memiliki peran vital dalam mendata potensi bencana, menyebarkan informasi, serta mengoordinasikan upaya penyelamatan saat bencana terjadi. Sistem pelaporan dini yang dilakukan masyarakat ketika mendeteksi tanda-tanda bencana, seperti peningkatan aktivitas vulkanik, menjadi bagian penting dalam mempercepat pengambilan keputusan dan proses evakuasi, sebagaimana diakui oleh BPBD Kabupaten Agam.

Selain itu, masyarakat juga aktif dalam penyusunan peta risiko partisipatif, yang memetakan daerah rawan bencana berdasarkan pengetahuan lokal. Peta ini menjadi panduan utama dalam menentukan lokasi aman untuk evakuasi, pembangunan posko, dan jalur evakuasi yang sesuai dengan kondisi medan serta aksesibilitas di lapangan.

Kegiatan pelatihan tanggap darurat menjadi aspek lain dari keterlibatan masyarakat. BPBD Kabupaten Agam secara rutin mengadakan pelatihan yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pemuda hingga kelompok rentan. Kepala Pelaksana BPBD menegaskan bahwa edukasi kebencanaan adalah bagian penting dari kesiapsiagaan kolektif, di mana warga diajarkan prosedur evakuasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pelatihan tersebut sangat mendukung proses mitigasi dan pemulihan.

Dr. Hasrul menambahkan bahwa pelatihan dan penyuluhan harus dijalankan secara berkelanjutan dan menjadi kebutuhan rutin masyarakat, bukan hanya program sementara. Tanpa konsistensi, partisipasi aktif masyarakat sulit terwujud.

Peran tokoh masyarakat juga sangat menonjol. Misalnya, Dery Saputra dari KSB Agam Timur aktif memberikan edukasi secara informal, dari mulut ke mulut, untuk menjangkau warga yang tidak mengikuti pelatihan resmi. Selain itu, tokoh-tokoh ini juga berperan dalam respon darurat ketika bencana terjadi.

Dalam situasi darurat, kekuatan solidaritas sosial warga Agam sangat terasa. Warga secara mandiri bergerak membangun dapur umum, mencari tempat tinggal sementara, serta membantu warga terdampak bencana. Wali Nagari menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan dari luar, tetapi saling membantu secara langsung.

Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi pascabencana juga mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kabupaten Agam. Masyarakat tidak hanya menyediakan bantuan logistik, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kembali rumah-rumah yang rusak melalui iuran dari berbagai daerah.

Meski demikian, sejumlah tantangan tetap dihadapi, terutama masalah budaya dan kesadaran. Dr. Hasrul mengungkapkan bahwa di daerah rawan bencana, bencana sering dianggap sebagai hal biasa atau bahkan takdir yang harus diterima, sehingga kesadaran untuk berperan aktif masih rendah. Selain itu, keterbatasan sarana, belum meratanya penyuluhan, dan minimnya posko permanen juga menjadi kendala dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Sebagai solusi, Dr. Hasrul menekankan pentingnya menyediakan infrastruktur pengingat, seperti tugu, plakat, atau petunjuk arah yang berfungsi sebagai pengingat risiko bencana, yang didampingi program edukasi berkelanjutan.

Kesimpulannya, untuk membangun sistem mitigasi bencana yang tangguh dan berkelanjutan, penguatan peran masyarakat sebagai garda terdepan sangatlah penting. Pendekatan partisipatif dan pemberdayaan berbasis komunitas harus menjadi strategi

utama, didukung dengan sarana dan prasarana memadai. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek perlindungan, melainkan subjek aktif yang memiliki kemampuan melindungi komunitasnya sendiri dari ancaman bencana.

Berdasarkan data yang dihimpun, masyarakat Kabupaten Agam sudah menunjukkan tingkat kesadaran kolektif yang cukup tinggi dan terorganisir dalam kesiapsiagaan bencana. Namun, penguatan kapasitas masih diperlukan, terutama dalam aspek literasi kebencanaan dan pelatihan teknis. Oleh karena itu, kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan dalam membina kapasitas masyarakat melalui pelatihan rutin, penyuluhan lokal, dan integrasi program mitigasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sangat diperlukan agar masyarakat semakin tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana.

Masyarakat Kabupaten Agam, terutama di Nagari Sungai Pua, menunjukkan peran aktif dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan kelompok-kelompok relawan yang siap membantu pada saat terjadi bencana. Kelompok relawan ini tidak hanya berfungsi sebagai tenaga pendukung dalam evakuasi, tetapi juga terlibat dalam pengumpulan bantuan logistik dan penyediaan kebutuhan dasar untuk para korban bencana. Sejalan dengan hal ini, penelitian oleh Mukarromah & Pranoto (2024) menunjukkan bahwa kelompok relawan lokal sangat efektif dalam mempercepat proses pemulihan pasca bencana karena mereka memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Selain itu, peran aktif masyarakat juga tercermin dalam pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur yang rentan terhadap bencana. Masyarakat sering kali melibatkan diri dalam proses pengawasan dan evaluasi pembangunan bangunan atau fasilitas publik yang dibangun di daerah rawan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menunggu bantuan saat bencana terjadi, tetapi mereka juga terlibat dalam upaya preventif untuk mengurangi risiko. Menurut Cahyani & Kurniasari (2024), partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur tahan bencana dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko lebih dini dan mengurangi kerugian materiil yang dapat terjadi akibat bencana.

### **Faktor Penghambat Efektivitas Mitigasi Bencana**

Mitigasi bencana merupakan upaya yang sangat penting dalam mengurangi dampak dari bencana alam dan memastikan bahwa masyarakat dapat pulih dengan cepat setelah suatu bencana terjadi. Namun, dalam prakteknya, terdapat berbagai faktor yang menghambat efektivitas upaya mitigasi bencana. Faktor-faktor ini mencakup keterbatasan sumber daya, masalah koordinasi antara lembaga terkait, kesenjangan informasi, hingga ketidaksesuaian antara perencanaan tata ruang dengan kondisi geografis yang rawan bencana. Tantangan-tantangan ini sering kali memperlambat proses mitigasi dan mempengaruhi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Beberapa faktor penghambat utama yang diidentifikasi dalam upaya mitigasi bencana antara lain adalah keterbatasan anggaran, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan masalah koordinasi lintas lembaga yang belum optimal.

Meskipun berbagai strategi telah diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat, efektivitas mitigasi bencana masih menghadapi hambatan-hambatan yang harus diatasi. Dalam konteks ini, beberapa sumber yang relevan, termasuk BPBD, tokoh masyarakat, pakar, dan DPRD, memberikan pandangan mereka mengenai faktor-faktor yang menghambat implementasi mitigasi bencana secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor penghambat tersebut dan memberikan solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas upaya mitigasi bencana di daerah rawan bencana.

Beberapa faktor penghambat utama yang ditemukan dalam pelaksanaan mitigasi bencana antara lain adalah:

a) Tantangan Melibatkan Masyarakat dalam Perencanaan

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan mitigasi bencana masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Meskipun upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya mitigasi bencana telah dilakukan, partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan rencana mitigasi maupun pembuatan peta risiko masih tergolong rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi keterlibatan mereka dalam proses perencanaan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh

seorang anggota DPRD, masyarakat perlu dilibatkan secara langsung dalam perencanaan mitigasi bencana, namun masih banyak warga yang kurang memahami pentingnya keterlibatan tersebut akibat kurangnya edukasi dan penyuluhan yang memadai mengenai mitigasi bencana.

Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara posisi masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak saat bencana terjadi dengan peran mereka dalam tahap perencanaan yang sejatinya dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Dr. Hasrul, M.Si yang menegaskan bahwa prinsip *citizenship* dalam konteks mitigasi bencana menuntut keterlibatan masyarakat secara aktif pada seluruh tahapan kegiatan mitigasi. Masyarakat tidak semata-mata sebagai objek dampak bencana, melainkan harus menjadi subjek yang berperan aktif mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penerapan langkah-langkah mitigasi berikutnya. Kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat menentukan efektivitas pelaksanaan mitigasi, sehingga keterlibatan mereka secara nyata merupakan faktor kunci keberhasilan mitigasi bencana.

#### b) Keterbatasan Sumber Daya dan Kesenjangan Informasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengidentifikasi keterbatasan anggaran sebagai salah satu kendala utama dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Terbatasnya sumber daya finansial ini berdampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan berbagai inisiatif mitigasi yang direncanakan. Beberapa daerah bahkan mengalami kesulitan dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengadaan peralatan penyelamatan serta pembangunan infrastruktur mitigasi yang bersifat esensial. Kondisi ini secara langsung menghambat upaya peningkatan kapasitas mitigasi di tingkat daerah.

Selain permasalahan anggaran, kesenjangan informasi antar lembaga juga menjadi hambatan yang signifikan dalam koordinasi penanggulangan bencana. Kurangnya konektivitas dan sinkronisasi informasi antara BPBD dengan dinas-dinas terkait sering kali menimbulkan tumpang tindih tugas serta potensi kelalaian dalam menghadapi ancaman

bencana. Hal ini mengindikasikan perlunya mekanisme komunikasi dan integrasi data yang lebih efektif antar lembaga guna mendukung pelaksanaan mitigasi yang optimal.

#### c) Masalah Koordinasi Lintas Lembaga

Koordinasi lintas lembaga menjadi faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan mitigasi bencana. Meskipun setiap lembaga memiliki peran strategis dalam pelaksanaan mitigasi, tanpa adanya koordinasi yang efektif, implementasi kebijakan mitigasi cenderung mengalami hambatan. Seorang pakar mitigasi menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antarinstansi, dengan mengungkapkan bahwa seringkali upaya mitigasi terganggu akibat data dan informasi yang dimiliki masing-masing pihak tidak terintegrasi secara baik. Ketidaksihinggaan data serta kelalaian dalam pertukaran informasi antar lembaga dapat menimbulkan proses mitigasi dan pemulihan yang berjalan lambat serta kurang efisien. Oleh karena itu, integrasi data dan komunikasi yang sinergis antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan respons dan efektivitas mitigasi bencana.

#### d) Kurangnya Data yang Akurat dan Terkini

Salah satu kendala utama dalam perencanaan mitigasi bencana adalah minimnya data yang akurat dan mutakhir terkait tingkat kerawanan wilayah. Ketersediaan data yang lengkap dan terpercaya merupakan prasyarat penting dalam pengambilan keputusan yang tepat mengenai langkah-langkah mitigasi yang harus diimplementasikan. Seorang pakar bencana menegaskan bahwa strategi mitigasi berbasis risiko sangat bergantung pada data yang valid mengenai kerawanan wilayah. Data yang usang atau tidak lengkap akan menghasilkan peta risiko yang kurang efektif dan tidak representatif untuk perencanaan mitigasi yang akurat. Ketidaktepatan dalam peta risiko ini berdampak pada kesulitan dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus, sehingga efektivitas pelaksanaan mitigasi menjadi terbatas dan tidak optimal.

#### e) Budaya Fatalisme di Masyarakat

Budaya fatalisme yang masih melekat kuat di beberapa wilayah menjadi salah satu kendala signifikan dalam mitigasi bencana. Masyarakat yang menganggap bencana sebagai takdir atau cobaan yang tidak bisa dihindari cenderung

bersikap pasif dan enggan melakukan persiapan atau upaya mitigasi. Sikap ini menurunkan efektivitas program mitigasi bencana karena kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Dr. Hasrul menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan untuk mengubah pola pikir fatalistik menjadi sikap yang lebih proaktif, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menghadapi ancaman bencana.

f) Ketidaksesuaian Tata Ruang dengan Kondisi Geografis

Ketidaksesuaian tata ruang dengan kondisi geografis yang rawan bencana menjadi kendala signifikan dalam upaya mitigasi. Banyak daerah yang melakukan pembangunan tanpa mempertimbangkan potensi risiko bencana seperti banjir dan longsor, sehingga meningkatkan kerentanan wilayah tersebut. Pakar tata ruang menegaskan bahwa pembukaan lahan di kawasan rawan longsor, misalnya, memperparah risiko bencana dan menyulitkan langkah mitigasi. Selain itu, Dr. Hasrul menekankan pentingnya keberlanjutan program mitigasi dan keterlibatan masyarakat secara mendalam. Menurutnya, pelibatan masyarakat harus menjadi bagian dari program pemerintah yang berkelanjutan, bukan hanya inisiatif sementara. Kesadaran dan kesiapan masyarakat yang terus-menerus sangat menentukan keberhasilan mitigasi, mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah dan lembaga terkait yang tidak selalu berada di lokasi saat bencana terjadi. Oleh karena itu, pembentukan kesadaran dan kesiapan masyarakat menjadi peran utama pemerintah dalam rangka menciptakan mitigasi bencana yang efektif dan berkelanjutan.

Faktor penghambat efektivitas mitigasi bencana tidak hanya bersifat teknis dan struktural, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan mitigasi yang berorientasi pada prinsip *citizenship*, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam seluruh tahapan mitigasi, menjadi kunci penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana. Mitigasi bencana yang efektif harus diiringi dengan program pendidikan berkelanjutan, pelibatan masyarakat secara nyata, serta koordinasi yang optimal antara semua pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, berbagai faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi dengan baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini—mulai dari perbaikan koordinasi antar lembaga, peningkatan partisipasi masyarakat, hingga pemutakhiran data risiko bencana—efektivitas mitigasi dapat meningkat sehingga masyarakat menjadi lebih siap menghadapi bencana dan dampaknya dapat diminimalisir.

Faktor penghambat yang lain yang dapat mempengaruhi efektivitas mitigasi bencana adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mitigasi jangka panjang. Meskipun sudah ada program pelatihan dan sosialisasi, tidak semua warga memahami pentingnya mempersiapkan diri jauh sebelum bencana terjadi. Pemahaman yang kurang ini sering menyebabkan ketidaksiapan warga dalam menghadapi bencana yang terjadi tiba-tiba. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian oleh Ali et. al (2023), pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran jangka panjang masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana.

Selain itu, salah satu hambatan lain yang juga sering dihadapi dalam mitigasi bencana adalah masalah logistik dan distribusi bantuan yang tidak merata. Saat terjadi bencana besar, distribusi bantuan sering kali terkendala oleh infrastruktur yang rusak dan sulit diakses. Keterbatasan sarana transportasi di beberapa wilayah Kabupaten Agam yang berada di dataran tinggi juga memperburuk distribusi bantuan. Hal ini mengarah pada terhambatnya proses pemulihan yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih cepat. Penelitian oleh Irwan & Rusmini (2024) menyebutkan bahwa peningkatan infrastruktur transportasi dan perencanaan logistik yang lebih matang sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses distribusi bantuan pasca bencana.

**Evaluasi dan Harapan Masyarakat terhadap Mitigasi Bencana**

Evaluasi masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana yang telah dilaksanakan menunjukkan sejumlah catatan penting, terutama terkait lambatnya respons awal saat bencana dan keterbatasan akses informasi evakuasi. Masyarakat mengharapkan

peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan bencana, transparansi penggunaan anggaran kebencanaan, serta program edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Selain itu, mereka juga menginginkan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal guna menciptakan lingkungan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap bencana.

Secara umum, masyarakat mengakui keberadaan upaya penanganan bencana melalui BPBD, Kelompok Siaga Bencana (KSB), dan pemerintah nagari. Namun, terdapat kritik terkait kecepatan respons awal dan ketersediaan informasi. Misalnya, Wali Nagari Sungai Pua menyatakan bahwa saat terjadi banjir lahar dingin pasca-erupsi, banyak kebutuhan mendesak belum terpenuhi pada hari pertama bencana. Meskipun dapur umum dari berbagai instansi telah beroperasi pada hari kedua, kekosongan waktu kritis pada awal kejadian perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Selain itu, masyarakat berharap keterlibatan mereka tidak hanya sebatas penerima bantuan pascabencana, tetapi juga aktif dalam proses mitigasi. Tokoh masyarakat dari Agam Timur menyoroti bahwa keberadaan KSB masih pasif di luar situasi darurat. Peran KSB idealnya juga difokuskan pada edukasi dan pelatihan berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat secara berkelanjutan.

Dari perspektif legislatif, anggota DPRD Kabupaten Agam mengakui bahwa meskipun bantuan dan koordinasi dengan BPBD telah dilakukan, masyarakat tetap mengharapkan transparansi serta kesinambungan dalam pemulihan pascabencana. Harapan tersebut mencakup perbaikan infrastruktur seperti irigasi, jembatan, dan lahan pertanian yang terdampak bencana, sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi jangka panjang.

Dalam hal edukasi kebencanaan, masyarakat meminta agar sosialisasi dan pelatihan dapat dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam menegaskan pentingnya pendidikan kebencanaan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Meskipun telah dilakukan sosialisasi prosedur evakuasi, evaluasi menunjukkan bahwa penyuluhan tersebut belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dengan akses terbatas.

Sebagai bentuk harapan, masyarakat menginginkan penguatan sinergi multipihak antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini dianggap penting dalam menciptakan sistem mitigasi bencana yang lebih adaptif dan tangguh terhadap risiko yang terus berkembang. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Dr. Hasrul, M.Si, yang menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat sebagai bagian integral dari sistem mitigasi bencana. Menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemahaman risiko menjadi kunci utama keberhasilan mitigasi.

Selain itu, masyarakat juga berharap adanya penguatan kapasitas kelembagaan, keberadaan posko permanen, pemutakhiran data risiko secara rutin, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat penyebaran peringatan dini.

Secara keseluruhan, evaluasi dan harapan masyarakat menunjukkan bahwa upaya mitigasi bencana di Kabupaten Agam telah memiliki fondasi yang cukup baik. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, diperlukan perbaikan terutama pada aspek respons cepat, distribusi informasi, edukasi berkelanjutan, dan koordinasi multipihak. Dengan keterlibatan masyarakat secara aktif, penguatan sistem, dan peningkatan kapasitas kelembagaan, visi menuju masyarakat yang tangguh bencana dapat diwujudkan.

Masyarakat Kabupaten Agam memberikan masukan positif terhadap upaya mitigasi bencana yang dilakukan, meskipun mereka berharap ada peningkatan dalam hal kecepatan tanggap darurat. Salah satu harapan utama mereka adalah adanya sistem peringatan dini yang lebih efisien dan lebih banyak dipasang di area rawan bencana. Kecepatan informasi yang diberikan oleh sistem peringatan dini sangat penting agar masyarakat dapat mengambil tindakan evakuasi sebelum bencana datang. Selain itu, masyarakat juga berharap agar pemerintah lebih memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi dampak bencana, seperti pembuatan tanggul penahan lahar di sekitar lereng Gunung Marapi. Sebagaimana diungkapkan oleh Fariza & Handayani (2022) pembangunan infrastruktur mitigasi yang lebih baik dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Harapan lain yang disampaikan oleh masyarakat adalah perlunya pembentukan lebih banyak pusat informasi yang dapat diakses

dengan mudah. Di beberapa daerah, informasi tentang status bencana dan langkah-langkah mitigasi seringkali tidak tersampaikan dengan baik, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu harus berbuat apa saat bencana datang. Masyarakat menginginkan adanya pusat informasi yang dapat diakses secara langsung dan cepat, terutama melalui aplikasi berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Lahi & Suldani (2025), yang menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi penting secara cepat dan efektif).

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi mitigasi bencana di Kabupaten Agam, dapat disimpulkan bahwa upaya mitigasi telah dilakukan dengan melibatkan berbagai aspek, termasuk peningkatan kapasitas petugas, penguatan sistem informasi kebencanaan, serta pembangunan infrastruktur tahan bencana. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan hambatan logistik, partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari prinsip *citizenship* memberikan kontribusi signifikan dalam efektivitas mitigasi. Temuan spesifik yang di dapat seperti antara BPDB Agam dengan wilayah terdampak untuk akses lokasi kerjasama dengan masyarakat belum efektif. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam pelaksanaan tetapi juga dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan infrastruktur menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif yang kuat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi bencana sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta penerapan prinsip *citizenship* yang mendorong partisipasi aktif dan transparansi. Oleh karena itu, penguatan prinsip *citizenship* dan kolaborasi multipihak perlu terus dioptimalkan dalam kebijakan mitigasi bencana ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, F. A., Wardhani, P. I., & Hidayatullah, R. A. (2023). Pendidikan Kebencanaan Dalam Kerangka Sdgs Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi (Studi Peristiwa Gempa Bumi Cianjur November 2022). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 809–820.

Aprilla, W., Wulandari, M., Elcaputera, A., Hukum, F., & Bengkulu, U. (2024). *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi kebijakan dan tindakan pemerintah , sementara akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik*. 2(4).

Cahyani, M. P. L., & Kurniasari, E. (2024). Beban Administrasi Pada Program BPBD Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 407–417.

Doni Monardo. (2019). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024. *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024*, 1–115.

Fariza, A., & Handayani, B. L. (2022). Tindakan struktural mitigasi bencana pemerintah di Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(2), 288–305.

Fatima, I., & Sudiby, D. P. (2023). Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 136–150.

Indriani, C. (2021). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja*. Universitas Hasanuddin.

Irwan, I., & Rusmini, R. (2024). *Pengendalian Bantuan Logistik Korban Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan*. IPDN.

Lahi, B., & Suldani, M. R. Y. (2025). Komunikasi Risiko Bencana: Mendukung Ketahanan Bencana Banjir Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 10(1), 1–18.

Lubis, B., Putro, K. Z., Kesuma, I. N. A. B., & Kharisma, M. I. (2023). The Essence of *Citizenship* Education in the Character Development of Students in Elementary

- Schools. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(3), 311–315.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class. Cambridge University Class.*
- Mukarromah, L., & Pranoto, Z. L. (2024). Evaluasi Implementasi Desa Tangguh Bencana: Studi Kasus di Jawa Tengah dan Peran Teknologi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 370–382.
- Nugroho, E., Indarjo, S., Nisa, A. A., Isniyati, H., Hermawan, D. Y., Widyaningrum, H., Wasono, E., Laily, L. A., Utami, A. N. M., & Suci, C. W. (2023). Manajemen Dan Pengurangan Risiko Bencana Melalui Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana). *Bookchapter Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang*, 3, 92–113.
- Purba, A., Sumantri, S. H., Kurniadi, A., & Putra, D. R. K. (2022). Analisis kapasitas masyarakat terdampak erupsi gunung semeru. *PENDIPA Journal of Science Education*, 6(2), 599–608.
- Ritonga, A. (2024). Tinjauan Kebijakan: Evaluasi Efektivitas Upaya Penanggulangan Bencana di Desa Ciwangi. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 102–127.
- Sembada, W. Y., Pambudi, M. W. G., Mubarok, I., Febyana, A. M. D., Barri, I. A., & Mewangi, S. A. (2024). Mitigasi Bencana Sebagai Bentuk Aktualisasi Bela Negara Di Desa Buanajaya, Kabupaten Bogor. *Jurnal Bela Negara*, 2(1), 57–71.
- Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 398–407.
- Tamitiadini, D., Adila, I., & Dewi, W. W. A. (2019). *Komunikasi bencana: Teori dan pendekatan praktis studi kebencanaan di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Wulandari, D. P. (2022). Analisis Determinan Kompetensi Pegawai Terhadap Implementasi New Public Service di Kabupaten Lamongan. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 43–61.